JM, VOL. 1 , NO. 1 , MARET 2019, Hal: 85-94
ISSN-P 2355-0376
ISSN-E 2656-8322

ANALISIS STRATEGI PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DAN EFEKTIFITAS PENERIMAAN PBB DI TIMBULUN TAHUN 2012 – 2016

Hesta Linda, Agussalim M, Yulistia
Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Ekasakti,
Jl. Veteran Dalam No. 26B Padang 25113

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui pengukuran tingkat efektifitas, efesiensi dan ekonomi reliasasi target penerimaan kas Nagari Timbulun dengan menggunakan pengukuran *value for money*. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitan ini yaitu dengan menggunakan riset lapanga dan riset pustaka. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan pengukuran *value for money*. Hasil penelitian ini menunjukka bahwa Berdasarkan analisa deskriptif diketahui tingket efesiensi penerimaan pajak Nagari Timbulun dari tahun 2012-2016 kurang efektif hal ini karena realisasi penerimaan pajak kurang dari 80%. Tingkat ekonomi Nagari Timbulun lebih sering berada pada tidak ekonomis karena realisasi pengeluaran lebih besar daripada anggaran pengeluaran. Tingkat efesiensi Nagari Timbulun selalu tidak efesien, hal ini disebabkan realisasi pengeluaran selalu lebih besar daripada realisasi pendapatan. Strategi pemungutan pajak yang dilakukan oleh nagari timbulun adalah dengan menampilkan spanduk tentang pajak bumi dan bangunan di luar dan dalam ruangan kantor wali nagari Timbulun, mengingatkan masyarakat agar melakukan pembayaran pajak terutama pajak bumi dan bangunan serta menjelaskan manfaat pembayaran pajak bagi nagari Timbulun memberikan himbauan tertulis dan pembayaran di tempat kepada wajib pajak yang menunggak pembayaran lebih dari lima tahun.

Kata Kunci : tingkat ekonomi, tingkat efesiensi, tingkat efektifitas, value for money, pajak bumi dan bangunan.

COLLECTION STRATEGY ANALYSIS OF LAND AND BUILDING TAX EFFECTIVENESS NAGARI TIMBULUN 2012 - 2016

ABSTRACT

This study aims To determine the measurement of effectiveness, efficiency and economic relatiation target of cash receipts Nagari Timbulun by using the measurement of value for money. Data collection methods used in this research is by using research lapanga and research library. Methods of data analysis in this study using the measurement of value for money. The results of this study indicate that based on descriptive analysis known tingket efficiency of tax revenue Nagari Timbulun from 2012-2016 less effective this is because the realization of tax revenue less than 80%. The economic level of Nagari Timbulun is more often uneconomical because the realization of expenditure is greater than the expenditure budget. The level of efficiency of Nagari Timbulun is always inefficient, this is because the realization of expenditure is always greater than the realization of income. The tax collection strategy undertaken by villages is by displaying banners on the tax on the earth and buildings outside and inside the office of the Timbulun wali nagari, reminding the public to make tax payments, especially the land tax and building, and explain the benefits of tax payments for nagari Timbulun gives written appeal and On-site payments to taxpayers who are overdue for more than five years.

Keywords:Economic level, efficiency level, effectiveness level, value for money, land tax and building

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Indonesia termasuk negara yang berkembang, yang memiliki pendapatan dari berbagai sumber salah satunya yaitu berasal dari pemungutan pajak, baik pajak negara maupun pajak daerah yang menjadi sumber terbesar pendapatan negara kita berasal dari pemungutan pajak. Meskipun pemungutan pajak merupakan sumber terbesar untuk pendapatan kas negara dalam proses pemungutannya tidak jarang sekali mengalami kendala dan masalah seperti masalah minimnya pengetahuan masyarakat terhadap pemungutan pajak, masalah kesadaran masyarakat untuk menjadi Wajib Pajak yang bijak dengan membayar pajak kepada negara, serta masalah penunggakan pembayaran pajak di negara kita ini sangatlah banyak terjadi di beberapa tahun terakhir.

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untukkeperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU No. 28 Tahun 2007).

Pajak merupakan alat bagi pemerintah dalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari masyarakat guna membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan nasional dan ekonomi masyarakat. Sistem perpajakan selalu mengalami perubahan dari masa kemasa sesuai perkembangan masyarakat dan Negara, baik dalam bidang kenegaraan maupun dalam bidang sosial dan ekonomi.

Di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2012 menjelaskan peraturan tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan menyebutkan ada beberapa pajak yang telah ditentukan pemerintah pusat yang dapat dilaksanakan oleh Nagari Timbulun Kecamatan Tanjung Gadang Kabupaten Sijunjung, yaitu :

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Atas Tanah dan Bangunan.

Pentingnya pajak sebagai sumber pembiayaan pembangunan telah ditetapkan dalam berbagai produk perundang-undangan pemerintah, dalam neraca APBN misalnya telah ditentukan penerimaan Negara bersumber dari penerimaan dalam Negeri dan penerimaan pembangunan. Penerimaan Negara yang berasal dari pajak sebagaimana telah ditetapkan oleh undang-undang sudah menjadi kewajiban bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Salah satu pajak yang menjadi potensi sumber pendapatan negara kita yaitu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang masuk dalam kategori Pajak Negara. Sejak tahun 2011 penarikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dilimpahkan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Kota sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri nomor: 213/pmk.07/2010, nomor: 58 tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah . Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yaitu iuran yang dikenakan terhadap orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak, memiliki, menguasai dan memperoleh manfaat dari bumi dan bangunan (Rahman, 2011:41).

Pemerintah perlu melakukan intensifikasi pemungutan pajak agar dapat meningkatkan penerimaan negara atau daerah, khususnya intensifikasi sektor Pajak Bumi dan Bangunan. Peningkatan penerimaan dari sektor pajak ini akan lebih efektif perolehannya jika ada peran serta aktif dari masyarakat. Untuk meningkatkan peran serta aktif dari masyarakat maka dirubahlah sistem

pemungutan pajak yang semula *Official Assesment* menjadi sistem *SelfAssesment*. Sistem *Self Assesment* memberikan kepercayaan kepadamasyarakat untuk menghitung dan membayar sendiri pajak yang terutang. Tujuan sistem tersebut diharapkan pelaksanaan administrasi perpajakan lebih rapi, terkendali, sederhana dan mudah dipahami oleh wajib pajak. Untuk itu kantor pajak dianggap perlu memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya membayar pajak agar tidak terdapat tunggakan lagi.

Pajak Bumi dan Bangunan yang termasuk kedalam pajak negara yang dipungut oleh pemerintah Nagari Timbulun dapat diandalkan untuk meningkatkan penerimaan pendapatan di Nagari Timbulun sehingga dapat meningkatkan kehidupan masyarakat. Untuk mengetahui jumlah pajak terhutang dapat dilihat dari table sebagai berikut :

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah Pajak terhutang dari 4 Jorong di Nagari Timbulun paling banyak pada tahun 2014 sebanyak 8.908.729. Dengan banyaknya pajak terhutang tersebut pemerintah berharap optimalisasi dalam pajak Bumi dan Bangunan ini akan tercapai. Namun penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan masih kurang baik. Hal ini dikarenakan banyak kendala-kendala dalam hal Pajak Bumi dan Bangunan sehingga hasil yang didapat kurang maksimal. Hal ini terlihat dari tabel berikut :

Sumber : Kantor Wali Nagari Timbulun 2016

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dalam 5 (Lima) tahun terakhir penerimaan PBB selalu gagal untuk memenuhi target PBB Yang telah ditetapkan yaitu mencapai 100%. Yang mana pada target terbaik pada tahun 2012 dengan target Rp.6.487.831 yang terealisasi Rp.4.671.239 dan target terendah pada tahun 2014 dengan target Rp.8.908.729 terealisasi Rp.5.536.500 atau 62,14%.

Berkaitan dengan tidak tercapainya dan terealisasinya target yang ditentukan, pemerintah setempat menggunakan uang kas Nagari untuk membayar pajak tersebut, bagi masyarakat yang tidak pernah melakukan pembayaran PBB karena kurangnya kesadaran dari masyarakat tersebut jika mereka mengurus segala administrasi surat menyurat akan disuruh terlebih dahulun untuk membayar pajaknya.

Salah satu penyebab rendahnya terealisasi target yang ditentukan yaitu pegawai yang terkaitan tentang pengurus tidak melakukan sosialisasi kerumah-rumah wajib pajak, karena dengan sosialisasi atau penyuluhan wajib pajak lebih tahu tentang fungsi dan kegunaan membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Saat peneliti melakukan observasi dikantor Wali Nagari Timbulun, dengan tujuan untuk mendapatkan data awal tentang sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan yang telah dilakukan oleh pegawai kepada masyarakat Nagari Timbulun, dan kemudian pegawai Kantor Wali Nagari Timbulun menjawab sebagai berikut :

"Untuk kegiatan sosialisasi atau penyuluhan ke rumah-rumah yang ada di Nagari Timbulun memang tidak pernah di lakukan, karena tidak adanya perintah dari Pajak untuk melakukan kegiatan tersebut". (Hasil Wawancara November 2016).

Dari hasil wawancara, peneliti mempunyai gambaran umum ternyata pihak dari pemungut Pajak tidak melakukan sosialisasi atau penyuluhan ke Nagari Timbulun Kecamatan Tanjung Gadang Kabupaten Sijunjung. Mengingat betapa pentingnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai salah satu sumber Keuangan Negara dalam rangka untuk membiayai kegiatan-kegiatan pembangunan dan pemerintahan maka,

diperlukan adanya penanganan dan perhatian yang serius dari semua pihak. Baik mengenai petugas pemungut, wajib pajak, maupun mengenai proses pelaksanaan pemungutan itu sendiri.

Dalam hal ini Kantor Wali Nagari Timbulun melakukan beberapa strategi agar kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan meningkat, diantaranya dengan meningkatkan kualitas petugas pemungutan pajak dan memberikan pelayanan pajak dengan sangat baik. Dengan menerapkan strategi ini, sedikit banyak telah mampu meningkatkan pembayaran pajak bumi dan bangunan di Nagari Timbulun.

Dari latar belakang yang telah dikemukakan diatas, penulis ingin meneliti dan melihat keadaan yang sebenarnya dilapangan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Analisis Strategi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)Serta Efektifitas PBB di Nagari Timbulun Tahun 2012 – 2016".**

Teori Pemungutan Pajak

Menurut Wirawan B. Ilyas dalam Surya Arisman (2015) ada beberapa teori yang mendasari adanya pemungutan pajak, yaitu:

1. Teori asuransi, menurut teori ini negara mempunyai tugas untuk melindungi warganya dari segala kepentingannya baik keselamatan jiwanya maupun keselamatan harta bendanya. Untuk perlindungan tersebut diperlukan biaya seperti layaknya dalam perjanjian asuransi diperlukan adanya pembayaran premi. Pembayaran pajak ini dianggap sebagai pembayaran premi kepada negara. Teori ini banyak ditentang karena negara tidak boleh disamakan dengan perusahaan asuransi.
2. Teori kepentingan, menurut teori ini, dasar pemungutan pajak adalahadanya kepentingan dari masing-masing warga negara. Termasuk kepentingan dalam perlindungan jiwa dan harta. Semakin tinggi tingkat kepentingan perlindungan, maka semakin tinggi pula pajak yang harusdibayarkan. Teori ini banyak ditentang, karena pada kenyataannya bahwa tingkat kepentingan perlindungan orang miskin lebih tinggi daripada orang kaya. Ada perlindungan jaminan sosial, kesehatan, dan lain-lain. Bahkan orang yang miskin justru dibebaskan dari beban pajak
3. Teori bakti, mengajarkan bahwa penduduk adalah bagian dari suatu negara oleh karena itu penduduk terikat pada negara dan wajib membayar pajak pada negara dalam arti berbakti pada Negara
4. Teori gaya pikul, teori ini mengusulkan supaya didalam hal pemungutan pajak pemerintah memperhatikan daya pikul wajib pajak
5. Teori gaya beli, menurut teori ini justifikasi pemungutan pajak terletak pada akibat pemungutan pajak. Misalnya tersedianya dana yang cukup untuk membiayai pengeluaran umum negara, karena akibat baik dari perhatian negara pada masyarakat maka pemungutan pajak juga baik
6. Teori pembangunan. Untuk Indonesia, justifikasi pemungutan pajak yang paling tepat adalah pembangunan dalam arti masyarakat yang adil dan makmur

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Analisa Deskriptif

Analisa deskriptif digunakan untuk mengukur kinerja sektor public dengan menggunakan metode pengukuran *value for money* yaitu :

a. Tingkat Efektifitas

Analisis tingkat efektifitas menggunakan rasio efektivitas keuangan daerah sesuai dengan Keputusan Mendagri. Tingkat efektifitas diukur berdasarkan penerimaan PBB dan target penerimaan PBB Nagari Timbulun dari tahun 2012 s/d 2016.

$$2012 = \frac{4.671.239}{6.487.831}\ x\ 100\% = 72\%$$

$$2013 = \frac{4.907.197}{7.607.197}\ x\ 100\% = 64{,}5\%$$

$$2014 = \frac{5.536.500}{8.908.729}\ x\ 100\% = 62{,}14\%$$

$$2015 = \frac{6.628.848}{8.838.464}\ x\ 100\% = 65\%$$

$$2016 = \frac{6.287.596}{8.855.796}\ x\ 100\% = 71\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas didapatkan tahun 2012 merupakan tahun paling efektif dalam pencapaian realisasi target penerimaan PBB di Nagari Timbulun sebesar 72%. Sedangan tahun 2014 merupakan yang terendah dengan presentase sebesar 62,14%. Berikut di bawah ini disajikan tabel kriteria efektifitas realisasi penerimaan PBB pada Nagari Timbulun dari tahun 2012 s/d 2016.

Dari hasil analisis efektifitas di atas, didapatkan realisasi penerimaan PBB Nagari Timbulun kurang efektif dari tahun 2012-2016 karena berada pada rasio 60% - 80%. Efektifitas realisasi penerimaan PBB Nagari Timbulun yang selalu berada kurang efektif dikarenakan kurangya minat masyarakat akan membayar pajak. Kurangnya minat masyarakat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

1. Tingkat pendidikan masyarakat yang rendah.

   Rendahnya pendidikan masyarakat Nagari Timbulun yang sebagian besar lulusan sekolah menengah pertama kebawah, membuat masyarakat tidak menyadari pentingnya manfaat membayar pajak. Selain itu, faktor tidak adanya sosialisasi dari petugas Nagari Timbulun membuat ketidaktahuan masyarakat tidak berubah sama sekali.
2. Kemiskinan

   Kemiskinan adalah faktor yang paling berpengaruh terhadap pencapaian target realisasi penerimaan pajak bumi bangunan Nagari Timbulun. Masyarakat yang memiliki tunggakan pajak bumi bangunan, karena dilandasi faktor kemiskinan menjadi enggan untuk membayar pajak bumi bangunan. Dengan faktor ini petugas wali nagari Timbulun tidak bisa memaksakan masyarakat tersebut agar membayar pajak bumi bangunan.
3. Ketidakpercayaan

   Ketidakpercayaan masyarakat kepada pengelolaan pajak disebabkan banyaknya berita mengenai penyalahgunaan dana pajak oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Penyalahgunaan tersebut sampai kepada masyarakat menengah kebawah Nagari Timbulun, membuat masyarakat menjadi enggan dalam membayar pajak. Karena sebahagian besar masyarakat menengah kebawah Nagari Timbulun memiliki tingkat pendidikan dibawah sekolah menengah pertama yang kurang dapat mencerna dengan baik berita yang ditayangkan di televisi nasional.
4. Pelayanan yang kurang baik

   Setelah ada niat dari masyarakat untuk membayar pajak, faktor yang krusial lainnya adalah pelayanan dari petugas penerimaan pajak itu sendiri. Dengan kurang baiknya

pelayanan yang diberikan oleh pegawai wali nagari Timbulun membuat masyarakat menjadi malas untuk membayar pajak. Peningkatan pelayanan pegawai wali nagari Timbulun akan membuat minat masyarakat dalam membayar pajak menjadi naik.

b. Tingkat Ekonomi

Tingkat ekonomi digunakan untuk mengukur presentase realisasi pengeluaran dan anggaran pengeluaran Nagari Timbulun dari tahun 2012-2016. Pengukuran tersebut disajikan pada perhitungan dibawah ini :

$$2012 = \frac{234.348.200}{235.836.000}\ x\ 100\% = 99{,}37\%$$

$$2013 = \frac{258.234.900}{255.423.900}\ x\ 100\% = 101{,}1\%$$

$$2014 = \frac{284.923.000}{280.349.000}\ x\ 100\% = 101{,}63\%$$

$$2015 = \frac{312.934.000}{320.872.000}\ x\ 100\% = 97{,}53\%$$

$$2016 = \frac{342.983.000}{341.238.000}\ x\ 100\% = 100{,}51\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas didapatkan tahun 2015 merupakan tahun paling ekonomis dalam pengukuran realisasi pengeluaran terhadap anggaran pengeluaran di Nagari Timbulun sebesar 97,53%. Sedangan tahun 2014 merupakan yang terendah dengan presentase sebesar 101,63%. Berikut di bawah ini disajikan tabel kriteria tingkat ekonomi pada Nagari Timbulun dari tahun 2012 s/d 2016.

Dari hasil analisis efektifitas di atas, didapatkan tingkat ekonomi Nagari Timbulun ekonomis pada tahun 2012 dan 2015, sedngkan tahun 2013, 2014 dan 2016 tidak ekonomis karena realisasi pengeluaran lebih besar dari anggaran pengeluaran. Kemampuan efektifitas Nagari Timbulun yang rata rata tidak ekonomis dikarenakan beberapa hal, yaitu:

1. Banyaknya pengeluaran tidak terduga yang muncul di pertengahan tahun.
2. Perencanaan anggaran pengeluaran yang kurang baik dari wali nagari Timbulun.
3. Tidak adanya perencanaan ulang pada saat membuat anggaran pendapatan dan belanja nagari, karena hanya memakai forat anggaran tahun yang lalu sehingga kesalahan yang sama dalam penyusunan anggaran pengeluaran selalu terulang.

c. Tingkat Efesiensi

Tingkat efesiensi digunakan untuk mengukur presentase realisasi pengeluaran dengan realisasi pendapatan Nagari Timbulun dari tahun 2012-2016. Pengukuran tersebut disajikan pada perhitungan dibawah ini :

$$2012 = \frac{234.348.200}{220.382.190}\ x\ 100\% = 106{,}34\%$$

$$2013 = \frac{258.234.900}{231.939.000}\ x\ 100\% = 111{,}34\%$$

$$2014 = \frac{284.923.000}{258.912.000}\ x\ 100\% = 110{,}05\%$$

$$2015 = \frac{312.934.000}{290.423.000}\ x\ 100\% = 107{,}75\%$$

$$2016 = \frac{342.983.000}{321.872.000}\ x\ 100\% = 106{,}56\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas didapatkan tahun 2012 merupakan tahun paling efesien dalam pengukuran realisasi pengeluaran terhadap realisasi penenerimaan di Nagari Timbulun sebesar 106,34%. Sedangan tahun 2013 merupakan yang terendah dengan presentase sebesar 111,34%. Berikut di bawah ini disajikan tabel kriteria tingkat efesiensi pada Nagari Timbulun dari tahun 2012 s/d 2016.

Dari hasil analisis efesiensi di atas, didapatkan tingkat efesiensi Nagari Timbulun tidak efesien selama tahun 2012-2016, hal ini terjadi karena realisasi pengeluaran selalu lebih besar

dari realisasi pendapatan. Kemampuan efesiensi Nagari Timbulun selalu tidak efesien, hal ini dikarenakan oleh beberapa hal yaitu :

1. Realisasi pengeluaran Nagari Timbulun selalu lebih besar dari realisasi pendapatan.
2. Realisasi pengeluaran Nagari Timbulun selalu lebih besar dari anggaran pengeluaran, sedangkan realisasi pendapatan selalu lebih kecil dari anggaran pendapatan. Hal ini membuat kesenjangan jumlah pendapatan dan pengeluaran terjadi setiap tahun.

Dengan kesenjangan yang sering terjadi kantor wali nagari Timbulun setiap tahun selalu meminta bantuan dana kepada pemerintah kabupaten Sijunjung.

Pembahasan

Dari analisa deskriptif yang telah dilakukan, terdapat diketahui beberapa hal berikut ini :

1. Tingkat efesiensi penerimaan pajak Nagari Timbulun dari tahun 2012-2016 kurang efektif hal ini karena realisasi penerimaan pajak kurang dari 80%. Kurang efektifnya penerimaan pajak Nagari Timbulun disebabkan kurangnya minat masyarakat dalam membayar pajak, kurangnya sosialisasi kantor wali nagari Timbulun kepada masyarakat dan pesimisme masyarakat terhadap pembayaran pajak. Kedepannya kantor wali nagari Timbulun akan menjalankan strategi strategi untuk meningkatkan minat masyarakat nagari Timbulun untuk membayar pajak, khususnya Pajak Bumi dan Bangunan.
2. Tingkat ekonomi Nagari Timbulun lebih sering berada pada tidak ekonomis karena realisasi pengeluaran lebih besar daripada anggaran pengeluaran. Realisasi pengeluaran yang lebih besar dari anggaran pengeluaran disebabkan banyaknya pengeluaran tak terduga yang timbul selama satu periode. Pengeluaran tersebut tidak diperhitungkan dalam anggaran pengeluaran yang disusun seblumnya. Pengeluaran yang lebih besar dari yang telah dianggarkan juga menjadi salah satu penyebab tingkat ekonomi nagari Timbulun tidak ekonomis.
3. Tingkat efesiensi Nagari Timbulun selalu tidak efesien, hal ini disebabkan realisasi pengeluaran selalu lebih besar daripada realisasi pendapatan. Dengan rendahnya minat masyarakat nagari Timbulun dalam membayar pajak membuat anggaran Nagari Timbulun selalu defisit. Pengeluaran selalu lebih besar daripada pendapatan. Hal ini menyebabkan Nagari Timbulun setiap tahun selalu meminta bantuan dana ke daerah tingkat II (Kabupaten Sijunjung).
4. Strategi pemungutan pajak yang dilakukan kantor wali nagari Timbulun untuk menumbuhkan minat masyarakat dalam membayar pajak, terutama pajak bumi dan bangunan berdasarkan hasil wawancara penulis dengan wali nagari Timbulun dan masyarakat Nagari Timbulun antara lain :
   a. Pihak wali nagari Timbulun menampilkan spanduk tentang pentingnya pembayaran pajak terutama pajak bumi dan bangunan pada pintu masuk dan ruang tunggu di dalam kantor wali nagari Timbulun. Pembuatan spanduk ini bertujuan agar masyarakat yang datang ke kantor wali nagari dapat membaca spanduk tersebut selagi menunggu antrian.
   b. Ketika masyarakat berinteraksi dengan pegawai kantor wali nagari Timbulun, pegawai yang

bersangkutan selalu mengingatkan masyarakat agar melakukan pembayaran pajak terutama pajak bumi dan bangunan serta menjelaskan manfaat pembayaran pajak bagi nagari Timbulun.

c. Kantor wali nagari Timbulun secara berkala memberikan surat himbauan kepada wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak bumi dan bangunan lebih dari lima tahun, dan memberikan potongan denda bagi masyarakat yang melakukan pembayaran pada saat yang ditentukan.
d. Kantor wali nagari Timbulun memberlakukan sistem bayar ditempat ketika petugas memberikan surat himbauan kepada wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak bumi dan bangunan lebih dari lima tahun, bagi masyarakat yang melakukan pembayaran ditempat akan diberikan potongan denda yang lebih besar daripada melakukan pembayaran di kantor wali nagari.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai Strategi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Realisasi Target Penerimaan Kas Nagari Timbulun Tahun 2012 – 2016 maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan analisa deskriptif diketahui tingket efesiensi penerimaan pajak Nagari Timbulun dari tahun 2012-2016 kurang efektif hal ini karena realisasi penerimaan pajak kurang dari 80%.
2. Tingkat ekonomi Nagari Timbulun lebih sering berada pada tidak ekonomis karena realisasi pengeluaran lebih besar daripada anggaranpengeluaran.
3. Tingkat efesiensi Nagari Timbulun selalu tidak efesien, hal ini disebabkan realisasi pengeluaran selalu lebih besar daripada realisasi pendapatan.
4. Strategi pemungutan pajak yang dilakukan oleh nagari timbulun adalah dengan menampilkan spanduk tentang pajak bumi dan bangunan di luar dan dalam ruangan kantor wali nagari Timbulun, mengingatkan masyarakat agar melakukan pembayaran pajak terutama pajak bumi dan bangunan serta menjelaskan manfaat pembayaran pajak bagi nagari Timbulun memberikan himbauan tertulis dan pembayaran di tempat kepada wajib pajak yang menunggak pembayaran lebih dari lima tahun.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, dapat dikemukakan beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfat bagi perusahaan atau pihak lain yang berkepentingan. Adapun saran yang diberikan, antara lain :

a. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektifitas, tingkat ekonomi dan tingkat efesiensi Nagari Timbulun selalu berada dibawah rata rata, disarankan kepada pihak wali nagari Timbulun agar meningkatkan realisasi penerimaan pajaknya dan menurunkan biaya pengeluaran yang selama ini banyak datang tidak terduga. Peningkatan ini berguna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nagari Timbulun.
b. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu bahan pendukung pengambilan keputusan oleh pihak wali Nagari Timbulun agar dapat meningkatkan realisasi penerimaan PBB diasa yang akan datang.

DAFTAR REFERENSI

Abdul Rahman SKM.Msi, 2011, *Perencanaan Pajak, Perlukah*, Bandung: Pustaka Setia

Ari Widiyanto (2012) *Evaluasi Realisasi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kabupaten Klaten Tahun 2007-2011*

Amalia (2012) *Analisis Strategi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Serta Efektivitas Penerimaannya Di Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2013-2014*

Anas Syukriah (2015), *Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB P2) sebagai Pajak Daerah serta Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Semarang Tahun 2012 dan 2013*

Budi Saputra (2014), *Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB P2) sebagai Pajak Daerah serta Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Samarinda Tahun 2012 dan 2013*

Dian Anggraeni (2013) *Analisis Strategi Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb) Di Kota Surabaya Terhadap Peningkatan Realisasi Target Penerimaannya Dari Tahun 2006-2011*

Dinar Ratna Wulansepty (2014) *Strategi Pemungutan Pbb Kota Surabaya Terhadap Realisasi Target Penerimaan Tahun 2009-2012*

Dispenda Kabupaten Sijunjung, 2016. *Strategi Pemungutan Pajak Daerah*.

Ida Ayu Metha Apsari Prathiwi (2015) *Analisis Strategi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan (Pbb P2) Serta Efektivitas Penerimaannya Di Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2013-2014*

Joko Efendi (2013) *Evaluasi Realisasi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kabupaten Malang Tahun 2008-2012*

Keputusan Menkeu No 523/KMK.04/1998 tentang *Penentuan Klasifikasi dan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)*

Kinanti (2010) "*Pengaruh Ekstensifikasi PBB dan Pelaksanaan Pembangunan Terhadap Otonomi Daerah di Kota Manado*"

Mahmudi. 2010. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Edisi Kedua. UPP AMP YKPN. Yogyakarta.

Mardiasmo., 2009, *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta: ANDI

Rahayu Winarti (2011) "*Ekstensifikasi Wajib Pajak Pph Untuk Meningkatkan Penerimaan Negara*"

Ramli Hanafi (2010) "*Pengaruh Ekstensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan dan Pelaksanaan Pembangunan Terhadap Otonomi Daerah di Kota Cirebon*"

Rezesa Astrie (2010), *Analisis Potensi Dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Kantor*

Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar

Rudi Saputro (2013) *Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Pbb P2) Terhadap Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (Pad)*

Sidik, Mahfud. 2010. *Optimalisasi Pajak Daerah dan Keuangan Daerah dalam. Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah*.

Surya Arisman (2015) *Analisis Pengelolaan Pajak Bumi Dan Bangunan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Takalar*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang *Tata Cara Perpajakan*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009. Tentang *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang *Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan*

Vika Purnamasari (2011) *Pengaruh Nilai Jual Objek Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Berdampak Pada Pendapatan Daerah (Survey Pada Kantor Pelayanan Pajak Bumi Dan Bangunan Kota Bandung)*